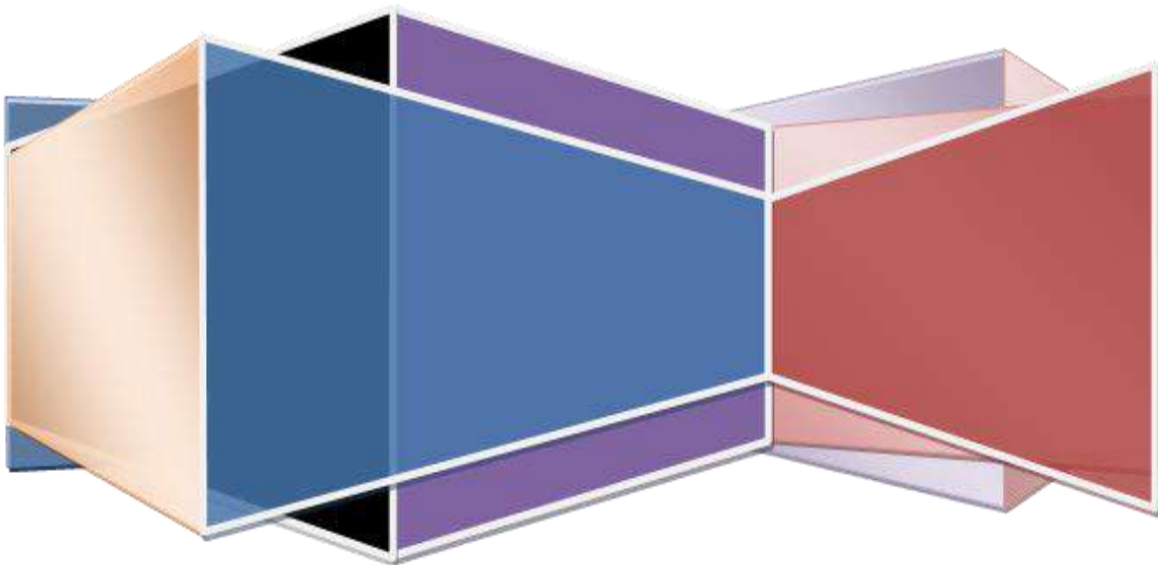


**RENCANA KERJA DAN
PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA-SKPD)**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Tanjung, September 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Utara

(**dr. H. Abdul Kadir**)
NIP. 197306022002121013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	4
E. Sistematika Penyusunan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022.....	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2022.....	5
B. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai Triwulan II Tahun 2022.....	12
BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	14
A. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan.....	14
B. Perubahan Belanja Rencana Kerja.....	14
BAB IV PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan sampai Tri Wulan II Tahun 2022.....	6
Tabel 2.2	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai Tri Wulan II Tahun 2022.....	12
Tabel 3.1	Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	16
Table 3.2	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022..	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Di Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati Lombok Utara di Bidang Kesehatan. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Bidang Kesehatan selama 1 (satu) tahun untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Perubahan rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk 1 tahun sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2022. Proses Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2021–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Uandang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Utara;
 15. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2022, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah pedoman rencana Kerja bagi seluruh personil Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan selama tahun 2022 untuk menggantikan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan Tahunan Dinas kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022;
- b. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perubahan 2022;
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;
- d. Untuk memastikan bahwa DPA 2022 Dinas Kesehatan telah disusun berdasar Rencana Kerja SKPD 2022;
- e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan perlu fokus pada penanganan permasalahan

kesehatan yang spesifik dan sangat mendasar. Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Tahun 2022 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran Kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2022

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Rencana strategis maupun rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan ini dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator outcome dan output sampai dengan triwulan II tahun 2022.

Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian kinerja dan realisasi target Renja 2022 pada akhir triwulan II. Hasil pengukuran kinerja indikator program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi keuangan selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan sampai Tri Wulan II Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				95.521.732.293		35.476.926.369	37,14
A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100	50.425.792.410	50	15.183.451.728	30,11
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memenuhi standar	%	100	13.752.451.700	62,5	43.780.000	0,31
a	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	3	1.244.280.700	0	0	0
b	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	8	2.815.000.000	0	0	0
c	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	125	2.747.600.000	0	0	0
d	Pengadaan Obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	2	3.491.634.061	0	43.780.000	1,25
e	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	2	3.453.936.939	0	0	0
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang mencapai target SPM	%	80	36.349.004.810	47,68	15.096.211.828	41,53
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.660	93.465.600	1.670	34.998.800	37,45
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.448	107.205.770	2.157	15.000.000	13,99
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.236	15.760.000	2.107	0	0
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	17.023	28.350.000	9.457	4.800.000	16,93
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	36.620	59.395.700	70.338	31.798.400	53,54
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pely. Kes. sesuai Standar	orang	21.723	15.060.000	9.643	0	0
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	12.740	20.000.000	8.075	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	2.329	469.770.000	1557	0	0
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	orang	601	7.936.800	199	3.760.000	47,37
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	orang	3.927	32.025.900	1.308	5.525.900	17,25
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	orang	11.072	52.000.000	3.959	0	0
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	602.743.940	0	46.920.000	7,78
m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	41.123.000	0	2.300.000	5,59
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	69.150.000	0	28.650.000	41,43
o	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	56.030.000	0	0	0
p	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	24	5.180.000	0	0	0
q	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	121.666.500	0	13.157.000	10,81
r	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	27.491.645.700	0	13.591.045.228	49,44
s	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	77.639.500	0	28.468.500	36,67
t	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	8	9.090.000	0	0	0
u	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	4.108.199.700	0	578.402.800	14,08

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
v	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	2	68.016.000	0	0	0
w	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	2.501.520.500	0	668.845.500	26,74
x	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	1	158.605.000	0	27.448.600	17,31
y	Penyediaan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	137.425.200	1	15.091.100	10,98
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	324.335.900	0	43.459.900	13,40
a	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	175.068.500	0	34.418.500	19,66
b	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	149.267.400	0	9.041.400	6,06
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang diterbitkan izinnya	fasyankes	0	0	0	0	0
a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	0	0	0	0	0
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	%	5	4.976.777.700	1,27	792.186.834	15,92
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin Praktik	%	100	34.880.000	20,00	0	
a	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1.660	34.880.000	332	0	
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM sesuai Rencana Kebutuhan	%	100	4.885.585.700	50,00	792.186.834	16,21
a	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	4.885.585.700	0	792.186.834	16,21

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang meningkat Kompetensinya	%	5	56.312.000	1,27	0	0
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	1.660	56.312.000	21	0	0
C	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Sediaan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan	%	100	78.450.000	0	2.240.000	2,86
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang memenuhi persyaratan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat pangan industri rumah tangga	%	100	78.450.000	0	2.240.000	2,86
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	90	78.450.000	0	2.240.000	2,86
D	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posga aktif	%	60	128.555.000	0	27.950.000	21,74
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posga aktif	%	60	128.555.000	0	27.950.000	21,74
a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	128.555.000	0	27.950.000	21,74
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran terpenuhi dan tepat waktu	%	100	39.912.157.183	50	19.471.097.807	48,78
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	108.434.000	50	24.891.000	22,95
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	11.970.000	1	4.595.000	38,39
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	23.373.000	0	0	0

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	23.470.000	0	480.000	2,05
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	13.415.000	1	12.720.000	94,82
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	13.565.000	0	0	0
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	22.641.000	1	7.096.000	31,34
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	0	0	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	33.001.827.951	50	17.065.139.607	51,71
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	3.900	32.346.521.451	650	16.913.002.207	52,29
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	560.044.000	0	152.137.400	27,17
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	laporan	1	95.262.500	0	0	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	331.249.472	50	101.862.898	30,75
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	13.899.400	50	8.129.400	58,49
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	65.701.772	50	45.826.400	69,75
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.400	38.053.300	50	14.247.400	37,44
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	100	19.000.000	50	2.100.000	11,05
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	194.595.000	50	31.559.698	16,22

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi sampai TW II		% Realisasi Anggaran
				K	Rp	K	Rp	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang terpenuhi dan tepat waktu	%	100	6.108.594.760	50	2.200.707.537	36,03
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	197.847.200	50	85.726.500	43,33
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	laporan	12	409.383.560	50	197.777.537	48,31
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	5.501.364.000	50	1.917.203.500	34,85
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana milik daerah dalam kondisi baik	%	100	362.051.000	50	78.496.765	21,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	48	362.051.000	50	78.496.765	21,68

Sampai Tri Wulan II atau Semester I tahun 2022, realisasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara senilai Rp35.476.926.369 (37,14%) dari PAGU Anggaran pada APBD Murni Rp95.521.732.293. Capaian realisasi keuangan yang masih rendah disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat-obatan serta bahan habis pakai dengan sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun Non Fisik masih dalam proses sehingga realisasi belanja sampai semester II belum terealisasi. Beberapa pengadaan alat kesehatan seperti pengadaan antropometri dan USG 2D juga ditunda oleh Kementerian Kesehatan karena menunggu spesifikasi teknis yang sesuai.
2. Belanja untuk Operasional Pelayanan Puskesmas dengan sumber anggaran DAK Non fisik juga realisasinya masih sangat rendah yang baru mencapai 14,08%, hal ini disebabkan karena realisasi oleh masing-masing puskesmas juga harus di imbangi dengan capaian target kinerja khususnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
3. Beberapa kegiatan juga belum dilaksanakan karena masih dalam pandemi Covid-19, seperti pelaksanaan survey akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FKTP/Puskesmas) dimana sampai saat ini belum ada petunjuk yang jelas dari Kementerian Kesehatan.

B. EVALUASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN SAMPAI TRI WULAN II TAHUN 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan urusan wajib setiap Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. SPM Bidang Kesehatan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan 12 (dua belas) indikator. Pencapaian indikator SPM bidang kesehatan Kabupaten Lombok Utara sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sampai Tri Wulan II Tahun 2022

No	Indikator SPM	Target Sasaran	Target Kinerja	Capaian Sasaran	% Kinerja
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.660	100	1.670	35,84
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.448	100	2.157	48,49
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.236	100	2.107	49,74
4	Pelayanan Kesehatan Balita	17.023	100	9.454	55,54
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.620	100	21.186	57,85

No	Indikator SPM	Target Sasaran	Target Kinerja	Capaian Sasaran	% Kinerja
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	147.017	100	70.338	47,84
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.723	100	9.643	44,39
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.740	100	8.075	63,38
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2.329	100	1.557	66,85
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	601	100	199	33,11
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.927	100	1.435	36,54
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	11.072	100	3.959	35,76

Dari tabel di atas rata-rata tingkat capaian SPM Bidang Kesehatan sampai Tri Wulan II tahun 2022 sudah mencapai 47,95% dari target selama semester I adalah rata-rata 50%. Dari 12 (dua belas) indikator SPM tingkat pencapaian tertinggi yaitu pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus yang mencapai 66,85%, sedangkan tingkat pencapaian terendah yaitu pada Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang hanya mencapai 33,11%.

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. FAKTOR FAKTOR YANG MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan berbagai pengamatan terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Lombok Utara, maka beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga.
- b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara lebih baik.
- c. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara melalui Program Universal Health Coverage (UHC).
- d. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta Prevalensi Balita Stunting sehingga diperlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan.
- f. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan.
- g. Melanjutkan kegiatan dan sub kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti PSC 119, Puskesmas Ramah Anak, Pembentukan Posyandu Keluarga (POSGA), pencegahan penyakit menular potensial wabah (DBD, Covid-19, Campak, Malaria, Difteri, Diare) dan penyakit tidak menular di setiap jenjang mulai dari Dusun, Desa sampai Tingkat Kecamatan.

B. PERUBAHAN BELANJA RENCANA KERJA

Renja instansi pemerintah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja meliputi apa yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, target, pendanaan dan keluaran dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatansangat tergantung pada situasi yang dinamis serta isu-isu terkini yang memungkinkan tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun pada Renja Akhir tahun 2022. Untuk itu agar perencanaan lebih realibel, efektif dan efisien perlu dilakukan kajian dan mempertimbangkan situasi yang dinamis yang menjadi faktor peluang, penghambat serta perubahan pada kekuatan dan kelemahan yang muncul dan dilakukan evaluasi dan perubahan Renja pada tahun berjalan.

Secara rinci, perubahan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tertuang pada tabel 3.1 berikut ini

Tabel 3.1
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				95.521.732.293		105,608,520,432	10.086.788.139	
A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100	50.425.792.410	100	54,940,894,111	4.515.101.701	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang memenuhi standar	%	100	13.752.451.700	100	17,165,066,010	3.412.614.310	
a	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	unit	3	1.244.280.700	3	1,499,390,700	255.110.000	Penambahan anggaran dengan sumber anggaran DBH CHT untuk rehabilitasi pustu gili trawangan termasuk penambahan anggaran untuk konsultan pengawas dan konsultan perencana.
b	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	8	2.815.000.000	8	2,888,200,000	73.200.000	Penambahan anggaran sumber dari DAU tambahan dari Kegiatan JKN, untuk Kegiatan Penadaan Sarana Air Bersih yaitu untuk jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawas pekerjaan
c	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	0	0	5	2,421,500,000	2,421,500,000	Penambahan anggaran untuk pengadaan ambulance emergency 1 unit dan ambulance operasional 2 unit dengan sumber anggaran SILPA pajak rokok dan 2 unit ambulance operasional dari SILPA dbh cht.
d	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	125	2.747.600.000	130	3,316,866,890	569.266.890	Penambahan anggaran dari Pajak Rokok untuk pengadaan kulkas vaksin, kursi gigi/dental unit dan alat kesehatan PSC 119 (tensimeter dan stetoskope) untuk menunjang kegiatan PSC 119
e	Pengadaan Obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	2	3.491.634.061	2	3,851,122,006	359.487.945	Pengurangan dari honor PPHP menyesuaikan dengan perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dan penambahan dana pengadaan obat dari SILPA DAK Reguler Kefarmasian tahun 2021 yang dianggarkan kembali. Penambahan kegiatan untuk pemusnahan obat kadaluwarsa, perjadi pengambilan obat buffer stock ke provinsi dan belanja internet untuk menunjang sistem aplikasi e-Logistik obat

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
f	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	2	3,453,936,939	2	2,995,365,939	(458.571.000)	Rasionalisasi anggaran dan dialihkan untuk biaya pemusnahan obat, kalibrasi alat kesehatan dan pengadaan computer pc untuk menunjang kegiatan di seksi farmalkes da nada penambahan anggaran untuk pengadan bhp sanitarian kit sumber anggaran DID
g	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	0	0	250	192,620,475	192.620.475	Penambahan anggaran untuk kalibrasi askes dari rasionalisasi anggaran di sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai, pemeliharaan kulkas vaksin puskesmas bersumber dari silpa pajak rokok dan kalibrasi sanitarian kit bersumber anggaran dari DID
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang mencapai target SPM	%	80	36,349,004,810	80	37,494,742,911	1.145.738.101	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.660	93,465,600	4.660	292,790,600	199.325.000	Pengadaan buku KIA dengan tambahan sumber anggaran dari Pajak Rokok
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.448	107,205,770	4.448	107,202,270	(3.500)	
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	4.236	15,760,000	4.236	15,750,000	(10.000)	
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	17.023	28,350,000	17.023	28,350,000	0	
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	36.620	59,395,700	36.620	57,495,700	(1.900.000)	Rasionalisasi anggaran
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pely. Kes. sesuai Standar	orang	21.723	15,060,000	21.723	15,060,000	0	
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	12.740	20,000,000	12.740	20,000,000	0	
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	orang	2.329	469,770,000	2.329	469,770,000	0	
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	orang	601	7,936,800	601	7,936,800	0	
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	orang	3.927	32,025,900	3.927	31,925,900	(100.000)	Rasionalisasi belanja dan perubahan kode rekening belanja

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	orang	11.072	52,000,000	11.072	77,000,000	25.000.000	Penambahan anggaran dengan sumber dana DTU perlindungan sosial untuk belanja hibah ke KPA
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	602,743,940	1	628,413,940	25.670.000	Penambahan dana dari Pajak Rokok untuk pengadaan sarana penunjang kegiatan surveilans gizi sebesar Rp5.670.000 dan penambahan dana dari dbh cht untuk dana pendukung PMT lokal sebesar Rp20.000.000.
M	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	41,123,000	1	41,123,000	0	
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	69,150,000	1	109,139,000	39.989.000	Pengadaan alat cetak jamban dengan penambahan anggaran dari sumber anggaran Pajak Rokok
o	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	56,030,000	1	34,143,300	(21.886.700)	Rasionalisasi anggaran ke sub kegiatan yang memerlukan pendanaan agar pencapaian tujuan program kegiatan lebih maksimal antara lain ke sub kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
p	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	24	5,180,000	24	5,180,000	0	
q	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	121,666,500	1	109,024,000	(12.642.500)	Rasionalisasi belanja menyesuaikan dengan RK DAK Non Fisik
r	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	27,491,645,700	1	27,603,782,350	112.136.650	Penambahan anggaran sumber dana dbh cht untuk pembayaran hutang kks sebesar Rp542.054.624, dan pengurangan PREMI BPJS dan Sharing luran dengan Provinsi yang dialihkan ke beberapa sub kegiatan
s	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	77,639,500	1	77,639,500	0	
t	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	8	9,090,000	8	9,090,000	0	
u	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	4,108,199,700	1	4,323,857,132	215.657.432	Pada APBD murni BOK puskesmas kurang input sehingga wajib dikembalikan sesuai dengan RK DAK Non Fisik

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
v	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	2	68,016,000	2	139,796,000	71.780.000	Penambahan anggaran untuk kegiatan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi puskesmas yang bersumber dari tambahan kegiatan JKN dan Kegiatan Reagen Farmasi
w	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan Pemberian Obat Massal)	laporan	1	2,501,520,500	1	2,876,420,500	374.900.000	Penambahan anggaran sesuai Permenkeu Nomor No.34/KM.37/2021 tentang pemotongan DAU untuk kegiatan TNI/POLRI dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19
x	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen	1	158,605,000	1	158,605,000	0	
y	Penyediaan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	137,425,200	1	255,247,919	117.822.719	Penambahan anggaran untuk hibah pmi sebesar Rp50.000.000, dengan sumber dana dtu perlindungan sosial Rp25.000.000 dan dbh minerba Rp25.000.000, serta penambahan kegiatan pengadaan Neon box dan pengadaan PDH PSC 119 tambahan dari kegiatan JKN dengan sumber dana DAU
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	324,335,900	100	259,855,190	(64.480.710)	
a	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1	175,068,500	1	36,318,500	(138.750.000)	Rasionalisasi anggaran ke sub kegiatan yang memerlukan pendanaan agar pencapaian tujuan program kegiatan lebih maksimal
b	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	149,267,400	1	223,536,690	74.269.290	Penambahan anggaran dari sub kegiatan yang dilakukan rasionalisasi untuk penguatan system informasi puskesmas (simpus) Penambahan dari Kegiatan JKN dengan sumber dana DAU
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang diterbitkan izinnnya	fasyankes	0	0	9	21,230,000	21,230,000	
a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	0	0	8	21,230,000	21,230,000	Penambahan sub kegiatan baru dengan pendanaan dari pengurangan kegiatan Yankestrad dengan sumber dana DAU
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya	%	5	4,976,777,700	5	5,349,316,200	372.538.500	
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Izin Praktik	%	100	34,880,000	100	34,350,000	(530.000)	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
a	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	1.660	34,880,000	1.660	34,350,000	(530.000)	Rasionalisasi anggaran dan dialihkan ke sub kegiatan pembinaan dan pengawasan SDM untuk pelatihan PONEB bagi petugas puskesmas untuk menurunkan AKI/AKB
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM sesuai Rencana Kebutuhan	%	100	4,885,585,700	100	5,258,654,200	373.068.500	
a	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	1	4,885,585,700	1	5,258,654,200	373.068.500	Penambahan anggaran dari bdh cht sebesar Rp90.000.000 untuk kegiatan pelatihan PONEB petugas puskesmas dan dari pengurangan anggaran sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang meningkat Kompetensinya	%	5	56,312,000	5	56,312,000	0	
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	1.660	56,312,000	1.660	56,312,000	0	
C	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Sediaan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan	%	100	78,450,000	100	64,050,000	(14.400.000)	
1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang memenuhi persyaratan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat pangan industri rumah tangga	%	100	78,450,000	100	64,050,000	(14.400.000)	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	dokumen	90	78,450,000	90	64,050,000	(14.400.000)	Rasionalisasi anggaran ke sub kegiatan yang memerlukan pendanaan agar pencapaian tujuan program kegiatan lebih maksimal
D	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posga aktif	%	60	128,555,000	60	158,555,000	30.000.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posga aktif	%	60	128,555,000	60	158,555,000	30.000.000	
a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	128,555,000	1	158,555,000	30.000.000	Pengadaan media promosi kesehatan dengan penambahan anggaran dari SILPA Pajak Rokok sebesar Rp30.000.000.
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dasar administrasi perkantoran terpenuhi dan tepat waktu	%	100	39,912,157,183	100	45,095,705,121	5.183.547.938	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	108,434,000	100	71,981,000	(36.453.000)	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	11,970,000	2	8,580,000	(3.390.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	23,373,000	1	8,760,000	(14.613.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	23,470,000	1	9,525,000	(13.945.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	13,415,000	1	13,415,000	0	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	13,565,000	1	10,465,000	(3.100.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	22,641,000	1	10,306,000	(12.335.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	0	0	1	10,930,000	10,930,000	Penambahan sub kegiatan baru yang pada APBD murni belum dianggarkan dan dananya diambilkan dari Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	33,001,827,951	100	38,880,867,261	5.879.039.310	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Renja Awal		Renja Perubahan		Bertambah / (Berkurang)	Analisa Perubahan
				K	Rp	K	Rp		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	3.900	32,346,521,451	3.900	38,457,544,761	6.111.023.310	Penggabungan gaji dan tunjangan ASN UPTD RSUD KLU ke Dinas Kesehatan
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	560,044,000	1	376,536,000	(183.508.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan dan belanja penggandaan
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	laporan	1	95,262,500	1	46,786,500	(48.476.000)	Rasionalisasi pada pengadaan ATK kegiatan dan belanja penggandaan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	331,249,472	100	294,601,100	(36.648.372)	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	13,899,400	12	13,899,400	0	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	65,701,772	12	46,226,400	(19.475.372)	Rasionalisasi anggaran
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2.400	38,053,300	2.400	27,553,300	(10.500.000)	Rasionalisasi anggaran dan dialihkan ke sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disedikan	dokumen	100	19,000,000	100	7,300,000	(11.700.000)	Rasionalisasi anggaran
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	194,595,000	12	199,622,000	5.027.000	Anggaran diambilkan dari pengalihan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang terpenuhi dan tepat waktu	%	100	6,108,594,760	100	5,520,059,760	(588.535.000)	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	197,847,200	12	173,607,200	(24.240.000)	Rasionalisasi anggaran dan dialihkan ke sub kegiatan lain
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	laporan	12	409,383,560	12	409,383,560	0	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	laporan	12	5,501,364,000	12	4,937,069,000	(564.295.000)	Rasionalisasi anggaran khususnya pengurangan pada belanja sewa rumah NS dan gudang alkes serta gaji tenaga kontrak
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana milik daerah dalam kondisi baik	%	100	362,051,000	100	382,201,000	20.150.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	48	362,051,000	48	382,201,000	20.150.000	Anggaran diambilkan dari pengalihan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan	0	0	0
5.1	Belanja Operasi	91.229.154.821	95.626.098.342	4.396.943.521
5.1.01	Belanja Pegawai	32.667.476.451	38.586.364.761	5.918.888.310
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.561.678.370	56.964.733.581	(1.596.944.789)
5.1.03	Belanja Hibah	0	75.000.000	75.000.000
5.2	Belanja Modal	4.292.577.472	9,982,422,090	5.689.844.618
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.088.296.772	6.353.141.390	3.264.844.618
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.204.280.700	1.204.280.700	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	2.425.000.000	2.425.000.000
Total Belanja		95.521.732.293	105,608,520,432	10.086.788.139

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp10.086.788.139 (sepuluh milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran pada belanja operasi sebesar Rp4. 396.943.521 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian :
 - Penambahan pada belanja pegawai sebesar Rp5.918.888.310 (lima milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah), karena gaji dan tunjangan ASN di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara digabung ke DPA Dinas Kesehatan dan penambahan pada TPP ASN.
 - Pengalihan anggaran pada belanja barang dan jasa ke belanja modal karena terdapat kekeliruan saat input di SIPD RKA murni yaitu pengadaan prasarana air bersih, pengadaan system informasi, dan pengadaan prasarana listrik dengan sumber anggaran DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian.
 - Penambahan belanja hibah, yaitu hibah ke KPA sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari DTU perlindungan sosial dan hibah ke PMI senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

yang bersumber anggaran dari DTU perlindungan sosial dan DBH Minerba.

2. Penambahan anggaran pada belanja modal sebesar Rp5.689.844.618 (lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan rincian :
 - Penambahan anggaran pada belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp3.264.844.618(tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah), yaitu ada penambahan belanja modal untuk pengadaan ambulance emergency, ambulance operasional, kulkas vaksin/vaccine refrigerator, kursui gigi/dental unit, pengadaan buku KIA, pengadaan media promosi kesehatan, pemeliharaan kulkas vaksin dan pengadaan alat cetak jamban dengan sumber anggaran dari DBH CHT dan Pajak Rokok, pengadaan BMHP dan jasa kalibrasi sanitarian KIT dengan sumber dana DID serta pengadaan obat-obatan dengan sumber anggaran SILPA DAK Reguler Kefarmasian.
 - Pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, pada APBD murni sebesar Rp0 (nol rupiah) dan pada rencana kerja perubahan ini diinput dari pengalihan belanja barang dan jasa ke belanja modal senilai Rp2.425.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan revisi dari Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rencana kerja Anggaran Perubahan Tahun 2022. Dengan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat memicu tercapainya persentase pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tanpa mengabaikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat serta mengedepankan kualitas kinerja yang lebih baik.

Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 ini terdapat penambahan belanja baik belanja operasi sebesar Rp4.132.073.947 (empat milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp5.732.659.618 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) sehingga total penambahan belanja yaitu sebesar Rp9.864.733.565 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Penambahan belanja pada Dinas Kesehatan karena belanja gaji dan tunjangan ASN dialihkan dari belanja di UPTD RSUD KLU ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, juga penambahan belanja dari penganggaran kembali SILPA DAK Fisik Reguler Kefarmasian, DTU Perlindungan Sosial, SILPA Dana Insentif Daerah (DID), SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), DBH Minerba, dan SILPA Pajak Rokok.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Dan pada akhir tahun anggaran 2022 akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.